

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka menunjang lajunya pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan di lahirkan manusia-manusia yang berkualitas yang akan mampu membangun dan memajukan bangsa dan negara, sehingga dapat dikatakan maju dan berkembang suatu masyarakat bangsa dan negara itu tergantung pada pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.¹

Berdasarkan Undang-Undang di atas jelas bahwa setiap warga negara berhak atas setiap individu untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Sedangkan yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab pada pendidikan formal adalah keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di selenggarakan melalui pendidikan di sekolah.

Khusus untuk lembaga formal (sekolah) adalah salah satu yang memegang peranan penting untuk mencapai keberhasilan dari suatu tujuan pendidikan di

¹Undang-Undang RI Pasal 3 No, 20 Th 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Sikdiknas), (Bandung: Citra Umbara, 2003). h. 8.

sekolah ditinjau oleh tiga komponen pendidikan, yaitu dalam bidang Pengajaran, bidang Administrasi, dan bidang Bimbingan dan Konseling.² Dari ketiga komponen tersebut Bimbingan dan Konseling merupakan suatu kegiatan bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada semua individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya.

Kegiatan Bimbingan dan Konseling sebagai salah satu kegiatan penting diselenggarakan secara profesional oleh tenaga khusus Guru Bimbingan/Konselor dengan layanan terarah kepada siswa/siswi sebagaimana disebutkan dalam SK Mendikbud No. 035/1995 berbunyi:

Bimbingan dan Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karier, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.³

Bimbingan dan Konseling adalah suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam pendidikan siswa, oleh sebab itu pendidikan dan Bimbingan dan Konseling tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, kesamaan dan hubungan erat antara Bimbingan dan Konseling dengan pendidikan nampak dalam dasar tujuan pengembangan individu.

Baik bimbingan maupun pendidikan memandang bahwa “Manusia pada dasarnya memiliki potensi-potensi dan kemudian untuk berkembang”.⁴ Dengan potensi dan kemudian manusia maju tahap demi tahap dalam pertumbuhan dan

²Dewa Ketut sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 1.

³Prayitno, dkk, *Seri Pemadu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1997), h. 4.

⁴Prayitno & Emam Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (jakarta: Bumi Aksara, 2003)

perkembangannya atas bantuan dari orang lain atau masyarakat, bantuan-bantuan itu dilaksanakan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode serta alat-alat yang khusus terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu, sehingga individu dapat mencapai kemandirian, memiliki pribadi yang utuh sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, itulah upaya Bimbingan dan Konseling.

Di dalam Bimbingan dan Konseling terdapat pelaksanaan sistem poin ada yang bersifat positif dan negatif, sistem poin yang bersifat positif mencakup tentang prestasi-prestasi siswa di Madrasah seperti peringkat ranking di kelas tiap semester, memenangkan perlombaan olah raga dan berbagai kegiatan lainnya. Kegunaan dari sistem poin positif ini adalah agar bisa memotivasi prestasi para siswa di Madrasah. Adapun sistem poin yang bersifat negatif adalah seperti kenakalan antar remaja, tauran, membolos, merokok di Madrasah, membawa benda tajam yang dapat membahayakan siswa lainnya, berpakaian seragam tidak rapi, terlambat datang, sering tidak masuk Madrasah. Dan masalah-masalah tersebut akan berakibat seperti tidak naik kelas, rendahnya nilai-nilai prestasi belajar, rendahnya motivasi dalam belajar, tidak bisa melanjutkan sekolah. Masalah-masalah kenakalan yang dilakukan siswa tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, hal tersebut harus ditanggulangi sedini mungkin yaitu dengan melaksanakannya sistem poin. Dimana di dalam sistem poin tersebut dapat beberapa aturan atau hukuman bagi siswa yang melanggar aturan ketentuan Madrasah akan diberi sanksi sesuai dengan tingkat jumlah poin yang ia dapat.

Contoh salah satu pelanggaran yang dilakukan siswa seperti:

1. Siswa yang bernama Budi (nama samaran) sering ketahuan tidur di kelas pada saat jam belajar dan poin yang ia dapat sebanyak 5 poin.
2. Siswa yang bernama Anna (nama samaran) membuat keributan di kelas pada saat jam belajar dan poin yang ia dapat sebanyak 10 poin.
3. Siswa yang bernama Andi (nama samaran) membawa rokok ke Madrasah dan poin yang ia dapat sebanyak 25 poin.

Adapun peran penting dalam melaksanakan sistem poin ini adalah kerjasama antara tiap-tiap wali kelas, guru mata pelajaran dan Guru Bimbingan dan Konseling, tiap wali kelas diberi beban dan tanggung jawab untuk mengawasi, memantau dan mencatat masing-masing siswa mereka yang telah melakukan pelanggaran tata tertib Madrasah setelah itu catatan poin tersebut dilaporkan kepada Guru Bimbingan dan Konseling. Apabila ada siswa melakukan pelanggaran yang tergolong kasus berat maka sanksi akan ditentukan melalui rapat Dewan Guru, Kepala Madrasah dan Guru Bimbingan dan Konseling.

Jadi, agar tujuan sistem poin dalam Bimbingan dan Konseling dapat tercapai dan terlaksana secara efektif harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak, diantaranya Kepala Madrasah, wali kelas, guru mata pelajaran, Guru Bimbingan dan Konseling, Orang tua/ wali murid dan dengan siswa itu sendiri.

Dilaksanakannya sistem poin sebagai tata tertib mempunyai tujuan dan maksud yakni memberi batasan-batasan kepada siswa agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau bersifat negatif, dimana nantinya dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Namun pada kenyataannya

tidak semua siswa mau memenuhi aturan-aturan tersebut, disinilah para pembimbing diharuskan memiliki metode yang tepat untuk disampaikan kepada mereka. Seorang pembimbing juga dituntut untuk bertindak secara bijaksana, ramah, bisa menghargai, dan mengetahui cara membimbing dengan baik.

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin merupakan salah satu Madrasah yang favorit yang ada di Banjarmasin, dalam melaksanakan visi dan misi pendidikan berupaya membina dan mengembangkan nilai-nilai moral dan agama pada siswanya. Hal ini mengimplekasikan dengan diterapkannya sistem poin di Madrasah.

Setiap siswa yang melanggar tata tertib Madrasah akan diberikan sanksi dalam bobot poin, berdasarkan pelanggaran yang dibuatnya. Apabila seorang siswa sudah mencapai bobot 100 poin, maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya, dikeluarkan dari Madrasah, bobot 100 poin berlaku selama siswa belajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan sistem poin, maka dari itu penulis mencoba menuangkan ke dalam sebuah Skripsi yang berjudul:

Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pelaksanaan Sistem Poin di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berorientasi dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pelaksanaan Sistem Poin sebagai Tata Tertib di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Poin sebagai Tata Tertib di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.

C. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi salah paham atau terhindar dari interpretasi yang keliru terhadap judul tersebut, maka penulis merasa perlu untuk menegaskan terhadap istilah tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

1. Peran menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan tindakan di suatu peristiwa/pekerjaan. Yang dimaksud peran menurut penulis adalah suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling terutama pada kegiatan pelaksanaan sistem poin.

Guru adalah seorang yang memberi/melaksanakan tugas pendidikan, jadi guru adalah orang yang di tugaskan untuk mendidik.

2. Bimbingan dan Konseling semula di kenal dengan istilah GC (*Guidance and counseling*) menurut Crow, seperti yang dikutip H.M Umar Sarjono mengartikan bimbingan yaitu:

Bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangan sendiri, membuat pilihannya sendiri dan memikul bebannya sendiri.⁵

Sedangkan konseling menurut James F. Adams seperti yang dikutip Jumhur dan Muhammad Surya diartikan dengan:

⁵ M. Umar Sarjono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: Pustaka Setia). h. 9.

“Suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu dimana seorang (konselor) membantu yang lain (klien) supaya ia lebih dapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi waktu itu dan pada waktu yang akan datang”.

Jadi, peran Guru Bimbingan dan Konseling yang dimaksud adalah seorang pendidik yang diberi tugas khusus dalam bidang Bimbingan dan Konseling yakni memberi bimbingan, arahan, atau pilihan-pilihan kepada siswa di Madrasah untuk perkembangan kehidupannya sesuai dengan yang diharapkan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan asal kata “laksana”, kemudian mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, yang mempunyai arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁶ Pelaksanaan yang dimaksud adalah proses dari melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah dirancang/direncanakan sebelumnya agar berjalan sesuai tujuan.

4. Sistem

Menurut John Mc Manama Sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.⁷ Jadi yang dimaksud sistem seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan suatu tujuan.

⁶ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. ke-III, h. 488.

⁷<http://www.creativebrain.web.id/media.php?action+readnews&id=84&title=Pengertian%20Sistem%20Menurut%20Para%20Ahli>.

5. Poin

Poin adalah Titik atau angka.⁸ Poin merupakan suatu bobot angka atau nilai yang biasa digunakan dalam suatu kegiatan tertentu.

Yang dimaksud pelaksanaan sistem poin yaitu melaksanakan suatu kegiatan pemberian angka/nilai (poin). Jadi pelaksanaan sistem poin ialah suatu metode atau kegiatan yang terarah yakni pemberian nilai (poin) kepada siswa di Madrasah baik nilai positif ataupun nilai negatif dan diberlakukan secara teratur oleh pihak madrasah kepada siswanya, dimana pemberian poin ini nantinya diharapkan dapat membina atau membimbing siswa ke arah akhlak/moral yang lebih baik dan proses pembelajaran pun di sekolah dapat berlangsung dengan tertib.

Kaitannya sistem poin sebagai tata tertib di Madrasah dengan peran Guru Bimbingan dan Konseling adalah sangat menentukan keberhasilannya, dimana sistem poin adalah salah satu tata tertib di Madrasah dalam rangka membina/membentuk kepribadian-kepribadian siswa di madrasah ke arah yang lebih baik, bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, dapat memotivasi semangat belajarnya dan menjadi siswa yang berprestasi sesuai bakat dan minatnya.

D. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ S. Wojowasito, *Kamus Umum Lengkap*, (Bandung, PT Pengarang, 1982). h. 295.

1. Mengingat pentingnya pelaksanaan sistem poin sebagai tata tertib yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin, karena dengan dilaksanakannya sistem poin dapat menunjang lancarnya proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah.
2. Ingin mengetahui peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam pelaksanaan sistem poin di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.
3. Untuk menjalankan visi dan misi Madrasah dalam menunjang pendidikan memerlukan peraturan di dalamnya berupa tata tertib yang harus di taati oleh seluruh siswa agar semua tindakan yang menghambat pembelajaran dapat di atasi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pelaksanaan Sistem Poin sebagai Tata Tertib di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Poin sebagai Tata Tertib di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk

1. Informasi bagi guru-guru Madrasah, sehingga dapat membuat dan melaksanakan sistem poin sebagai tata tertib Madrasah khususnya Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin.
2. Menambah khazanah pengetahuan bagi orang-orang yang berkeinginan / ingin mendalami dan mengetahui tentang Bimbingan dan Konseling.
3. Bacaan dan memperkaya khazanah perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Perpustakaan Fakultas Tarbiyah.
4. Bahan informasi bagi penelitian yang berkeinginan mengadakan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis tentang peran guru Bimbingan dan Konseling dalam pelaksanaan sistem poin, yang memuat pengertian peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam pelaksanaan sistem poin, pengertian Bimbingan dan Konseling, fungsi Bimbingan dan Konseling, pengertian pelaksanaan sistem poin sebagai tata tertib, tujuan Pelaksanaan sistem poin sebagai tata tertib, peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam pelaksanaan sistem poin sebagai tata tertib dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem poin sebagai tata tertib.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang objek dan subjek penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian yang didalamnya berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.

